

**BAB IV****TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN****4.1 Target Kinerja**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Bagian Kesekretariatan khususnya pada tata Kelola Pembangunan Keagamaan di tetapkan Target Kinerja sebagai berikut :

**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan tugas teknis lainnya**

Target yang ditetapkan untuk rasio jumlah adalah 90% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019. Sedangkan target yang ditetapkan untuk rasio mutu adalah 40% pada tahun 2015 menjadi 60% pada tahun 2019. Adapun pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggungjawab Sekeratriat Jenderal. Tarket kinerja dalam bentuk kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pemutakhiran Data BMN, 5 Angkatan;
2. Pemutakhiran Data Perencanaan dengan Sistem ADP 5 Angkatan;
3. Sosialisasi Pelaksanaan Revisi dan Percepatan Penyerapan Anggaran, 5 Angkatan;
4. Updating Laporan Elektornik Monitoring Pelaksanaan Anggaran, 9 Angkatan;
5. Rekrutmen CPNS 4 Kegiatan;
6. Sosialisasi dan Pembinaan Mental PNS 5 Kegiatan;
7. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana 5 Kegiatan;
8. Orientasi Kearsipan dan Tata Persuratan Elektronik 5 Kegiatan;
9. Peningkatan Pencitraan Lembaga (*Image Building*) 5 Kegiatan;
10. Orientasi Kearsipan dan Tata Persuratan Elektronik 5 Kegiatan;
11. Sinkronisasi Data dan Sistem Informasi Satuan Kerja 5 Kegiatan;
12. Monitoring data Perencanaan pada Kabupaten/Kota;
13. Monitoring data Keuangan pada Kabupaten/Kota;
14. Evaluasi rencana kerja Satuan kerja pada Kabupaten/Kota;

15. Penyusunan dan review Anggaran satuan kerja;
16. Pembutan rencana strategis bidang dan satuan kerja;
17. Pembuatan indikator kinerja bidang dan satuan kerja;
18. Pembuatan laporan tahunan;
19. Pelaksanaan TLHP;
20. Pelaksanaan lelang kegiatan melalui ULP dan Pokja;
21. Sosialisasi aturan dan regulasi di bidang pembinaan administrasi keuangan;
22. Sosialisasi aturan dan regulasi dalam bidang administrasi perencanaan;
23. Sosialisasi regulasi dalam pembinaan administrasi umum;
24. Sosialisasi regulasi pembinaan administrasi hukum dan KLN;
25. Sosialisasi regulasi pembinaan administrasi informasi keagamaan;
26. Sosialisasi regulasi administrasi kehumasan;
27. Sosialisasi regulasi kerukunan Ummat Beragama;
28. Sosialisasi wawasan multikulturalisme;
29. Dialog antara ummat beragama;
30. Pemberian bantuan Kerukunan Ummat Beragama;
31. Pemberdayaan Forum Kerukunan Ummat Beragama;

Dari target kinerja di atas diharapkan dapat mencapai sasaran:

1. Tersedianya Data BMN
2. Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Revisi dan Percepatan Penyerapan Anggaran.
3. Terselenggaranya Updating Laporan Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran.
4. Terlaksananya pemberkasan Rekrutmen CPNS.
5. Terselenggaranya Sosialisasi dan Pembinaan Mental PNS.
6. Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana.
7. Terselenggaranya Orientasi Kearsipan dan Tata Persuratan Elektronik.

8. Terselenggaranya Pembuatan dan Pemuatan Advertorial pada Media Cetak/Iklan Radio.
9. Terselenggaranya Kegiatan Kearsipan dan Tata Persuratan Elektronik.
10. Terselenggaranya Sinkronisasi Data dan Sistem Informasi Satuan Kerja.
11. Tersedianya laporan Monitoring data Perencanaan pada Kabupaten/Kota;
12. Tersedianya data Monitoring data Keuangan pada Kabupaten/Kota;
13. Tersedianya data Evaluasi rencana kerja Satuan kerja pada Kabupaten/Kota;
14. Tersedianya data hasil Penyusunan dan review Anggaran satuan kerja;
15. tersedianya rencana strategis bidang dan satuan kerja;
16. Tersedianya indikator kinerja bidang dan satuan kerja;
17. laporan tahunan;
18. terselesaikannya TLHP;
19. Terselenggaranya Pelaksanaan lelang kegiatan melalui ULP dan Pokja;
20. Aturan dan regulasi di bidang pembinaan administrasi keuangan;
21. Aturan dan regulasi dalam bidang administrasi perencanaan;
22. Meningkatnya pemahaman regulasi dalam pembinaan administrasi umum;
23. Meningkatnya pemahaman regulasi pembinaan administrasi hukum dan KLN;
24. Meningkatnya pemahaman regulasi pembinaan administrasi informasi keagamaan;
25. Meningkatnya pemahaman regulasi administrasi kehumasan;
26. Meningkatnya pemahaman regulasi kerukunan Ummat Beragama;
27. Meingtanya wawasan multikulturalisme;
28. Terselenggaranya dialog antar ummat beragama dan pemecahan kasus;
29. bantuan Kerukunan Ummat Beragama;
30. Aktifnya operasional Forum Kerukunan Ummat Beragama;

#### **Program Bimbingan Masyarakat Islam**

Target kinerja bidang Bimas Islam adalah Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran dan nilai-nilai keagamaan masyarakat, dengan beberapa target kegiatan sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat 155 Lembaga.
2. Terselenggaranya Pembinaan Amil Zakat 20 Lokasi.
3. Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Dakwah 5 Kegiatan.
4. Terselenggaranya Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan Tingkat Provinsi 5 Kegiatan.
5. Terselenggaranya Pemilihan Kantor Urusan Agama Teladan 5 Kegiatan.
6. Terselenggaranya Bimbingan teknis Operator SIMKAH 5 Kegiatan.
7. Terselenggaranya Bimbingan teknis SIMAS 5 Kegiatan.
8. Terselenggaranya Pembangunan Gedung KUA 5 Lokasi.
9. Terselenggaranya Rehab Gedung KUA dan meubelair pengganti 10 Lokasi.
10. Terselenggaranya sosialisasi Regulasi baru ttg tarif layanan NR di luar KUA
11. Sosialisasi Zona Integritas dan Pelaksanaan Pakta Integritas
12. Pengawasan terintegrasi dengan masyarakat
13. Peningkatan infrastruktur KUA
14. Pemanfaatan Sistem Informasi
15. Menyediakan anggaran untuk penguatan jaringan internet
16. Pengadaan computer
17. Pelatihan operasional SIMKAH
18. Rehab bangunan KUA
19. Meningkatkan kompetensi manajerial KUA
20. Sosialisasi KUA Bersih dan professional
21. Rekrutmen PNS khususnya Penghulu
22. Pemerataan penempatan Pegawai

23. Sosialisasi UU Jaminan Produk Halal melalui berbagai media
24. Bantuan biaya sertifikasi halal kepada UKM
25. Kampanye sadar halal melalui media masa (iklan layanan masyarakat).
26. Percontohan masjid mushalla yang paripurna
27. Pengembangan manajemen pengelolaan rumah ibadah
28. Perlunya juknis pelaksanaan PBM masjid yang dibangun sebelum di berlakukannya PBM.
29. Perlunya Juknis bantuan yg sesuai dengan ketentuan keuangan
30. Melakukan sinergi program dan tupoksi dengan Dit. Penais
31. Segera menerbitkan juknis pembinaan syariah
32. Upaya penyatuan kalender Hijriyah melalui berbagai cara dan pendekatan
33. Perlu adanya peningkatan Pengawasan, Pembinaan dan Pemahaman ajaran Islam terhadap kelompok yang menyimpang
34. Optimalisasi peran, Penyuluh & Ormas Islam dalam pembinaan kaum syiah dan Ahmadiyah
35. Melakukan komunikasi secara intensif dengan ormas Islam dan FPI untuk menemukan titik temu
36. Melakukan koordinasi dengan tokoh tokoh utama pada kelompok gerakan radikal dalam mencairkan suasana
37. Berkoordinasi dengan seluruh ormas Islam untuk pencegahan masuknya paham radikal
38. Mendeteksi lebih dini potensi radikalisme dan pintu masuknya
39. Penguatan dakwah berbasis *local value*
40. Penguatan peran PAI dalam penyelesaian konflik-konflik keagamaan
41. Penguatan peran ormas Islam dalam sosialisasi misi pembangunan nasional bidang agama

42. Melakukan kajian mendalam tentang arah dan potensi moderasi Islam dan pengaruhnya bagi dunia Islam
43. Revitalisasi dan restrukturisasi Bansos bagi Ormas Islam
44. Penyusunan *road map* pembinaan masyarakat Islam yang mengintegrasikan nilai nilai keislaman dan keindonesiaan
45. Penguatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah dan ormas Islam
46. Sosialisasi pentingnya sertifikasi tanah wakaf
47. Bantuan Sertifikasi tanah wakaf
48. Advokasi terhadap tanah wakaf yang sedang bersengketa.
49. Memberikan bantuan Wakaf Produktif
50. Pelatihan manajemen bagi nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif
51. Sosialisasi Undang-undang (UU) tentang Wakaf Uang.
52. Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Wakaf Uang
53. Gerakan Wakaf Uang
54. Sosialisasi UU tentang Zakat
55. Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Zakat.
56. Memberikan bantuan Zakat Produktif.
57. Pelatihan manajemen bagi Pengelola Zakat.
58. Melaksanakan UU Zakat tahun 2013 secara utuh.
59. Melakukan koordinasi dalam rangka membangun sinergi program antara BAZNAS dan LAZ

#### **Bimbingan Masyarakat Kristen**

1. Pembinaan dan pelayanan pendidikan agama Kristen;
2. Bimbingan dan pelayanan pembelajaran dan kurikulum, supervisi dan sertifikasi
3. Pembinaan sarana dan teknologi pendidikan tingkat dasar; bimbingan dan pelayanan pembelajaran dan kurikulum,

4. Akreditasi dan sertifikasi pendidikan serta sarana dan teknologi pendidikan tingkat menengah; serta pelayanan dan penyelenggaraan ketatausahaan.

Sasaran yang dicapai dari tagret kinerja di atas adalah :

1. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan pelayanan pendidikan agama Kristen;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kurikulum pendidikan tingkat Paud dan Dasar;
3. Meningkatnya kualitas supervisi dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan tingkat dasar;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan sarana dan prasarana teknologi pendidikan tingkat dasar;
5. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kurikulum pendidikan tingkat menengah;
6. Meningkatnya kualitas supervisi dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan tingkat menengah;
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan sarana dan prasarana teknologi pendidikan tingkat menengah

#### **Program Pendidikan Islam**

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program ini adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada lembaga pendidikan Islam yang diharapkan meningkat dari tahun 2015 - 2019. Untuk RA/BA dari 7,09% menjadi 7,65%, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari 12,18% menjadi 13,01%, Madrasah Tsanawiyah (MTS) dari 19,06% menjadi 18,28% , Madrasah Aliyah (MA) dari 7,65% menjadi 8,63%, Pesantren Salafiyah Ula dari 0,57% menjadi 0,69%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 2,26% menjadi 2,58%, Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dari 2,61% menjadi 2,82%, Kelompok Belajar Paket A dari 0,07% menjadi 0,11%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,27% menjadi 0,31% , Kelompok Belajar

Paket C dari 0,57% menjadi 0,61%, dan Pendidikan Tinggi Agama Islam (PAI) dari ,25% menjadi 3,00%.

Angka Partisipasi Murni (APM) juga diharapkan meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2019 yaitu: RA/BA dari 5,53% menjadi 5,97%, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari 10,11% menjadi 12,88%, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 13,91% menjadi 14,44%, Madrasah Aliyah (MA) dari 5,97% menjadi 6,73%, Pesantren Salafiyah Ula dari 0,50% menjadi 0,62%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 1,66% menjadi 1,78%, Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dari 2,04% menjadi 2,20%, Kelompok Belajar Paket A dari 0,06% menjadi 0,10%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,23% menjadi 0,27% , Kelompok Belajar Paket C dari 0,48% menjadi 0,52%.



Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Kemenag Malut Drs. H. Abdullah Latopada di MAN Galela Halmahera Utara

Adapun target kinerja Program Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dalah :

1. Terselenggaranya Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah 25 Kegiatan.
2. Jasa konsultan individual pelaksanaan bantuan blockgrant pada pontren 5 orang x 5 Kegiatan.



3. Kegiatan MQK Tingkat Provinsi 5 Kegiatan.
4. Bantuan operasional penyelenggaraan Paket A dan B pada Pontren 5 Lokasi.
5. Bantuan Penyelenggaraan Paket C pada Pontren dan Lembaga Keagamaan 5 Kegiatan.
6. Bantuan Penyelenggaraan Paket C pada Pontren dan Lembaga Keagamaan 5 Kegiatan.
7. Bantuan Penyelenggaraan PPS Wajar Dikdas pada Pontren 5 Lokasi.
8. Porseni Madrasah/Kompetisi Sains Siswa/Kompetisi dan Expo Madrasah tingkat Provinsi 5 kali.
9. Porseni Madrasah/Kompetisi Sains Siswa/Kompetisi dan Expo Madrasah tingkat Nasional 5 kali.
10. Jasa konsultan individual pelaksanaan bantuan blockgrant pada madrasah 5 Kegiatan.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan UN/UAMBN MA 5 Kegiatan.
12. Sosialisasi Penyelenggaraan UN/UAMBN MTs 5 kegiatan.



*Musabaqaah Kiraatil  
Kutub di Ome Tidore  
Kepulauan*

13. Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Bermutu 15 Kegiatan.
14. Kelengkapan dan beroperasinya Madrasah Aliyah Baru Cendekia.
15. Kelengkapan RK Madrasah (MI, Mts dan MA)
16. Terpenuhinya pemberian BOS MI (Swasta) selama 5 tahun
17. Terpenuhinya pemberian BOS PPs Ula semua Siswa selama 5 Tahun.
18. Terpenuhinya pemberian BOS MTs (Swasta) selama 5 tahun.
19. Terpenuhinya pemberian BOS PPS Wustha selama 5 tahun.
20. Terpenuhinya pemberian BOS MA (MA Swasta) selama 5 tahun
21. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan BOS 5 Kegiatan
22. Operasional Pelaksanaan BSM 5 Kegiatan
23. Rakor BSM Tingkat Provinsi 5 Kegiatan
24. Monitoring BSM Tingkat Provinsi 5 Kegiatan
25. Pemutakhiran Data EMIS 15 Kegiatan
26. Tersalurkannya KIP kepada 10.202 siswa MI/Ulya kurang mampu sampai dengan tahun 2019;
27. Tersalurkannya KIP kepada 8.662 siswa MTs/Wustha kurang mampu sampai dengan tahun 2019; dan
28. Tersalurkannya KIP kepada 6.123 siswa MA/Ulya kurang mampu sampai dengan tahun 2019.
29. Meningkatnya APK RA menjadi 80% pada tahun 2019;
30. Meningkatnya APK MI/Ula menjadi 85% pada tahun 2019;
31. Meningkatnya APM MI/Ulya menjadi 10% pada tahun 2019;

32. Meningkatnya APK MTs/Wustha menjadi 75% pada tahun 2019;
33. Meningkatnya APM MTs/Wustha menjadi 8% pada tahun 2019;
34. Meningkatnya APK MA/Ulya menjadi 85% pada tahun 2019;
35. Meningkatnya APM MA/Ulya menjadi 5% pada tahun 2019; dan
36. Menurunnya angka putus sekolah MI/Ula menjadi 3% pada tahun 2019;
37. Menurunnya angka putus sekolah MTs/Wustha menjadi 10% pada tahun 2019; dan
38. Menurunnya angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK menjadi 4% pada tahun 2019.
39. Meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B menjadi 20% pada tahun 2019;
40. Meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B menjadi 90% pada tahun 2019;
41. Meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 85% pada tahun 2019;
42. Meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B menjadi 80% pada tahun 2019;
43. Meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi 2% pada tahun 2019;
44. Meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi 5% pada tahun 2019; dan
45. Meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi 8% pada tahun 2019.
46. Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama yang ditandai dengan meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4 menjadi 80% pada tahun 2019;
47. Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama yang ditandai dengan jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud

Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah yang meningkat menjadi 8.598 santri pada tahun 2019;

#### **1. Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan Islam**

1. Meningkatnya angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) APK RA dengan angka 8% pada tahun 2019;
  - 2) Jumlah siswa RA menjadi sebanyak 1.673 siswa pada tahun 2019;
  - 3) APK MI/Ula dengan angka 10% pada tahun 2019;
  - 4) jumlah siswa MI/Ula menjadi sebanyak 11.223 siswa pada tahun 2019;
  - 5) APM MI/Ula dengan angka 10% pada tahun 2019;
  - 6) APK MTs/Wustha dengan angka 15% pada tahun 2019;
  - 7) Jumlah siswa MTs/Wustha menjadi sebanyak 8.662 siswa pada tahun 2019;
  - 8) APM MTs/Wustha dengan angka 20% pada tahun 2019;
  - 9) APK MA/Ulya dengan angka 10% pada tahun 2019;
  - 10) Jumlah siswa MA/Ulya menjadi sebanyak 6.736 siswa pada tahun 2019;
  - 11) APM MA/Ulya dengan angka 5% pada tahun 2019.
2. Menurunnya angka putus sekolah lulusan MI/Ula, MTs/Wustha, dan MA/Ulya yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) Persentase Angka Putus Sekolah MI/Ula menjadi kurang dari 5% pada tahun 2019;
  - 2) Jumlah angka putus sekolah MI/Ula menjadi kurang dari 1.500 siswa pada tahun 2019;
  - 3) Angka putus sekolah MTs/Wustha menjadi kurang dari 10% pada tahun 2019;
  - 4) Jumlah angka putus sekolah MTs/Wustha menjadi kurang dari 1.000 siswa pada tahun 2019;
  - 5) Angka putus sekolah MA/Ulya menjadi kirang dari 4% pada tahun 2019; dan

- 6) Jumlah angka putus Sekolah MA/Ulya menjadi kurang dari 893 siswa pada tahun 2019.
3. Tercapainya keseimbangan rasio peserta didik perempuan:laki-laki pada MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) Rasio APM peserta didik perempuan:laki-laki pada MI/Ula menjadi 0,15 pada tahun 2019;
    - 2) Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada MTs/Wustha menjadi 0,25 pada tahun 2019;
    - 3) Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada MA/Ulya menjadi 1,08 pada tahun 2019; dan
  4. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah RA yang terakreditasi minimal B menjadi 60 RA pada tahun 2019;
    - 2) persentase RA yang terakreditasi minimal B menjadi 20% pada tahun 2019;
    - 3) jumlah MI yang terakreditasi minimal B menjadi 100 MI pada tahun 2019;
    - 4) persentase MI yang terakreditasi minimal B menjadi 75% pada tahun 2019;
    - 5) jumlah MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 120 MTs pada tahun 2019;
    - 6) persentase MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 80% pada tahun 2019;
    - 7) jumlah MA yang terakreditasi minimal B menjadi 65 MA pada tahun 2019;
    - 8) persentase MA yang terakreditasi minimal B menjadi 90,0% pada tahun 2019.
  5. Meningkatnya jumlah madrasah yang layanan pendidikannya sesuai SNP yang ditandai antara lain dengan:
    - 1) jumlah MI memenuhi SNP menjadi sebanyak 45 MI pada tahun 2019;
    - 2) jumlah MTs memenuhi SNP menjadi sebanyak 75 MTs pada tahun 2019; dan
    - 3) jumlah MA memenuhi SNP menjadi sebanyak 30 MA pada tahun 2019.
  6. Meningkatnya jumlah ruang kelas madrasah/madin dalam kondisi baik yang ditandai antara lain dengan:

- 1) jumlah ruang kelas RA dalam kondisi baik sebanyak 85 ruang kelas pada tahun 2019;
  - 2) persentase ruang kelas RA dalam kondisi baik sebesar 80% pada tahun 2019;
  - 3) jumlah ruang kelas madrasah dalam kondisi baik sebanyak 1000 ruang kelas pada tahun 2019;
  - 4) persentase ruang kelas madrasah dalam kondisi baik sebesar 85% pada tahun 2019;
  - 5) jumlah ruang kelas Pendidikan Diniyah dalam kondisi baik sebanyak 90 ruang kelas pada tahun 2019; dan
  - 6) persentase ruang kelas Pendidikan Diniyah dalam kondisi baik sebesar 32% pada tahun 2019.
7. Terlaksananya program bantuan siswa/santri miskin melalui Kartu Indonesia Pintar yang ditandai antara lain dengan:
8. tersalurkannya KIP kepada 10.103 siswa MI/Ulya kurang mampu sampai dengan tahun 2019;
9. tersalurkannya KIP kepada 8.230 siswa MTs/Wustha kurang mampu sampai dengan tahun 2019; dan
10. tersalurkannya KIP kepada 6.000 siswa MA/Ulya kurang mampu sampai dengan tahun 2019.
11. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAI pada sekolah yang ditandai antara lain dengan:
- 1) persentase guru PAI berkualifikasi minimal D4/S1 sebesar 87% pada tahun 2019; dan
  - 2) jumlah guru PAI berkualifikasi minimal D4/S1 sebanyak 900 guru pada tahun 2019.

Untuk mencapai outcome tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

**1. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam, dengan sasaran meliputi:**

- a. Meningkatnya mutu guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) jumlah guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi;
  - 2) jumlah guru PAI yang ditingkatkan kualifikasi S1;
  - 3) jumlah guru PAI yang ditingkatkan kompetensinya;
  - 4) jumlah guru PAI berprestasi yang mengikuti program *visiting teacher* (guru tamu);
  - 5) jumlah pengawas PAI yang ditingkatkan kompetensinya;
  - 6) jumlah calon pengawas PAI yang berkualifikasi S2;
  - 7) jumlah GPAI yang mengikuti program PPG (Pendidikan Profesi Guru);
  - 8) jumlah Guru dan Pengawas PAI yang Mengikuti Bimtek kurikulum yang berlaku;
  - 9) jumlah guru yang mengikuti lomba pengembangan pembelajaran PAI; dan
  - 10) jumlah pengawas PAI yang terbina.
- b. Meningkatnya mutu siswa Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) jumlah siswa yang ikut pelatihan Tuntas Baca Tulis Qur'an (TBTQ);
  - 2) jumlah siswa yang mengikuti lomba kreatifitas PAI; dan
  - 3) jumlah dokumen penyelenggaraan USBN PAI.
- c. Meningkatnya pemahaman siswa atas keberagaman melalui Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang ditandai antara lain dengan jumlah siswa yang mendapat pengembangan PAI berwawasan kebangsaan.
- d. Meningkatnya mutu kelembagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) jumlah lembaga pokjawas yang ditingkatkan kapasitasnya;

- 2) jumlah lembaga yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI;
- 3) jumlah KKG dan MGMP yang dikembangkan di sekolah; dan
- 4) jumlah sekolah penerima bantuan sarana/media pembelajaran PAI.

**2. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam, dengan sasaran meliputi:**

- a. Meningkatnya akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:
  - 1) jumlah lembaga pendidikan diniyah pada pondok pesantren baru yang didirikan;
  - 2) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ula serta Paket A yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS);
  - 3) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Wustha serta Paket B yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS);
  - 4) Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Program Wajar Dikdas tingkat Ulya serta Paket C yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS);
  - 5) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ula serta Paket A yang mendapatkan Bantuan KIP;
  - 6) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Wustha serta Paket B yang mendapatkan Bantuan KIP;
  - 7) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas tingkat Ulya serta Paket C yang mendapatkan Bantuan KIP;
  - 8) jumlah Siswa Ula/Wustha/Ulya yang menerima kartu dan tersosialisasikan program Wajar 12 Tahun dengan KIP;



- 9) jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapat dukungan Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
  - 10) jumlah RKB pada pendidikan diniyah Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang dibangun;
  - 11) jumlah asrama pada pondok pesantren yang dibangun;
  - 12) jumlah lembaga pendidikan keagamaan baru di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang didirikan;
  - 13) jumlah lembaga pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang mendapatkan dukungan pengembangan/peningkatan mutu, sarana dan prasarana pendidikan, serta tata kelola; dan
  - 14) jumlah santri yang menerima layanan Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).
- b. Meningkatnya mutu sarana prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah ruang kelas pada pendidikan diniyah pada pondok pesantren/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang direhab;
  - 2) jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab;
  - 3) jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu sarana dan prasarananya;
  - 4) jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren ditingkatkan mutunya;
  - 5) jumlah kitab yang diajarkan pada lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang disediakan;
  - 6) jumlah lembaga penyelenggara Pendidikan Keagamaan yang ditingkatkan mutunya;

- 7) jumlah pesantren yang mendapatkan dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN);
  - 8) jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan dukungan peningkatan mutu sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
  - 9) jumlah pondok pesantren unggulan Tafaqquh Fiddin dan Vokasional/Keterampilan yang dikembangkan; dan
  - 10) jumlah lembaga pesantren, diniyah, diniyah takmiliyah, pendidikan al Quran yang terbina.
- c. Meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah santri yang menerima Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an);
  - 2) jumlah santri yang mengikuti Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK);
  - 3) jumlah santri pondok pesantren yang menerima Beasiswa Santri Berprestasi (Program Beasiswa Santri Berprestasi);
  - 4) jumlah santri pondok pesantren yang mendapatkan dukungan pembiayaan Pemagangan Santri Pondok Pesantren;
  - 5) jumlah santri yang mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN);
  - 6) jumlah santri yang mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS); dan
  - 7) jumlah santri yang mendapat beasiswa bagi santri pondok pesantren untuk belajar di pesantren besar/unggulan untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
- d. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:

- 1) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang ditingkatkan kompetensinya;
  - 2) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal pada pondok pesantren /Program Wajar Dikdas serta Paket A, Paket B, dan Paket C yang ditingkatkan kualifikasinya;
  - 3) jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal pada pondok pesantren yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru;
  - 4) jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal pada pondok pesantren/ program persamaan lulusan/program wajar dikdas/paket penerima tunjangan fungsional;
  - 5) jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal pada pondok pesantren penerima tunjangan profesi;
  - 6) jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang ditingkatkan mutunya;
  - 7) jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapatkan tunjangan fungsional;
  - 8) jumlah Pengasuh Pesantren yang ditingkatkan mutunya; dan
  - 9) jumlah pendidik yang menerima Beasiswa Pendidikan Kader Ulama.
- e. Meningkatnya jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang dipersiapkan akreditasinya;
  - 2) jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu pembelajarannya;
  - 3) jumlah dokumen regulasi pada pendidikan keagamaan Islam yang dihasilkan;
  - 4) jumlah dokumen data pendidikan keagamaan Islam yang dihasilkan;

- 5) Jumlah paket peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam;
  - 6) jumlah mitra kerja pendidikan keagamaan Islam (FKDT/FKPP/FKPM/FKMA dll) yang diberdayakan;
  - 7) jumlah penyelenggaraan Bahtsul Ma'sail/Halaqoh pada lembaga pendidikan keagamaan yang dilaksanakan; dan
  - 8) jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan layanan pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan kerja (*life skill*); dan
  - 9) tersusunnya Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam.
- f. Meningkatnya kualitas pembelajaran pendidikan Islam yang moderat pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah penyelenggaraan tahkiq atas kitab karya ulama nusantara yang dilaksanakan;
  - 2) jumlah penyelenggaraan sosialisasi pemahaman keagamaan yang toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), moderat (tawasuth), dan cinta tanah air yang dilaksanakan; dan
  - 3) jumlah penyelenggaraan deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan yang dilaksanakan.

**3. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah, dengan sasaran meliputi:**

- a. Meningkatnya akses pendidikan madrasah yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah siswa RA yang menerima Bantuan Biaya Operasional (BOP);
  - 2) jumlah siswa MI penerima BOS;
  - 3) jumlah siswa MI penerima KIP (BSM);
  - 4) jumlah siswa MTs penerima BOS;
  - 5) jumlah siswa MTs penerima KIP (BSM);
  - 6) jumlah siswa MA penerima BOS;

- 7) jumlah siswa MA penerima KIP (BSM);
  - 8) jumlah siswa MI/MTs/MA yang menerima kartu dan tersosialisasikan program Wajar 12 Tahun dengan KIP;
  - 9) jumlah ruang kelas baru yang dibangun pada RA;
  - 10) jumlah ruang kelas MI yang dibangun;
  - 11) jumlah ruang kelas MTs yang dibangun;
  - 12) jumlah ruang kelas MA yang dibangun;
  - 13) jumlah MTs yang dibangun pada daerah 3T;
  - 14) jumlah MI-MTs Satu Atap yang dibangun;
  - 15) jumlah MTs-MA Satu Atap yang dibangun; dan
  - 16) jumlah MA yang dibangun.
- b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah RA yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pembelajaran;
  - 2) jumlah ruang kelas RA yang direhab;
  - 3) jumlah ruang kelas MI rusak sedang yang direhabilitasi;
  - 4) jumlah ruang kelas MI rusak berat yang direhabilitasi;
  - 5) jumlah perpustakaan MI yang dibangun;
  - 6) jumlah MI yang meningkat standar UKS;
  - 7) jumlah MI yang memiliki sarana prasarana termasuk meubulair;
  - 8) jumlah ruang kelas MTs rusak sedang yang direhabilitasi;
  - 9) jumlah ruang kelas MTs rusak berat yang direhabilitasi;
  - 10) jumlah perpustakaan MTs yang dibangun;
  - 11) jumlah MTs yang meningkat standar UKS;
  - 12) jumlah MTs yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler;
  - 13) jumlah asrama MTs yang dibangun;
  - 14) jumlah MTs yang memiliki laboratorium IPA;

- 15) jumlah MTs yang memiliki peralatan laboratorium IPA;
  - 16) jumlah ruang kelas MA rusak sedang yang direhabilitasi;
  - 17) jumlah ruang kelas MA rusak berat yang direhabilitasi;
  - 18) jumlah perpustakaan MA yang dibangun;
  - 19) jumlah MA yang meningkat standar UKS;
  - 20) jumlah MA yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler;
  - 21) jumlah MA berasrama yang dibangun/dikembangkan;
  - 22) jumlah MA yang memiliki laboratorium IPA;
  - 23) jumlah MA yang mendapat peralatan laboratorium IPA;
  - 24) jumlah MA yang memiliki laboratorium bahasa;
  - 25) jumlah MA yang memiliki laboratorium komputer;
  - 26) jumlah peralatan laboratorium bahasa MA;
  - 27) jumlah peralatan laboratorium komputer MA;
  - 28) jumlah asrama MA yang dibangun;
  - 29) jumlah MA unggulan (insan cendekia) yang dikembangkan;
  - 30) jumlah MTs yang disiapkan menjadi Madrasah Unggulan; dan
  - 31) jumlah MA yang dipersiapkan menjadi Madrasah Unggulan.
- c. Meningkatnya mutu siswa madrasah yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah siswa RA yang mengikuti lomba/kompetisi;
  - 2) jumlah siswa MI mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi;
  - 3) jumlah siswa MI mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional;
  - 4) jumlah siswa MTs mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi;
  - 5) jumlah siswa MTs mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional;
  - 6) jumlah siswa MA mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi;
  - 7) jumlah siswa MA mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional;
  - 8) jumlah siswa MA berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri;
  - 9) jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UAMBN PAI dan Bhs Arab;

- 10) jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UN; dan
  - 11) jumlah siswa MA yang mengikuti program pemagangan di DU/DI.
- d. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan madrasah yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah guru/kepala RA yang ditingkatkan kompetensinya;
  - 2) jumlah PTK MI yang ditingkatkan kompetensinya;
  - 3) jumlah PTK MTs yang ditingkatkan kompetensinya;
  - 4) jumlah PTK MA/MAK yang ditingkatkan kompetensinya;
  - 5) jumlah guru madrasah yang ditingkatkan kualifikasi S1;
  - 6) jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan fungsional;
  - 7) jumlah PTK non-pns yang menerima tunjangan profesi;
  - 8) jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan khusus;
  - 9) jumlah guru Madrasah yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru;
  - 10) jumlah guru madrasah mapel umum yang disertifikasi;
  - 11) jumlah guru yang dinilai kinerjanya;
  - 12) jumlah PTK (guru, calon kepala madrasah, dan calon pengawas) yang ditingkatkan kualifikasi pendidikan S2;
  - 13) jumlah PTK madrasah penyelenggara pendidikan inklusi yang ditingkatkan kompetensinya;
  - 14) jumlah PTK madrasah penerima penghargaan dan perlindungan;
  - 15) jumlah guru MA yang mendapatkan penguatan pembinaan kewirausahaan;  
dan
  - 16) jumlah guru yang disiapkan menjadi Kepala Madrasah.
- e. Meningkatnya jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan madrasah yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah RA yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
  - 2) jumlah RA yang dipersiapkan menjadi RA Unggulan;

- 3) jumlah RA yang ditingkatkan mutu manajemennya;
- 4) jumlah MI yang meningkatkan kualitas kegiatan ekstra kurikuler;
- 5) jumlah MI yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
- 6) jumlah MI yang disiapkan menjadi madrasah unggulan;
- 7) jumlah MI menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM);
- 8) jumlah KKM MI diberdayakan;
- 9) jumlah KKG MI diberdayakan;
- 10) jumlah MI melaksanakan penguatan riset;
- 11) jumlah MTs yang meningkat kegiatan ekstrakurikuler;
- 12) jumlah MTs yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
- 13) jumlah MTs yang menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM);
- 14) jumlah KKM MTs yang diberdayakan;
- 15) jumlah MGMP MTs yang diberdayakan;
- 16) jumlah MTs melaksanakan program riset;
- 17) jumlah MA yang meningkat kegiatan ekstrakurikuler;
- 18) jumlah MA yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
- 19) jumlah MA menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM);
- 20) jumlah KKM MA yang diberdayakan;
- 21) jumlah MGMP MA yang diberdayakan;
- 22) jumlah MA yang menyelenggarakan program keterampilan;
- 23) jumlah MA yang menyelenggarakan program keagamaan;
- 24) jumlah MA melaksanakan program riset;
- 25) jumlah madrasah daerah tertinggal/perbatasan/pedalaman yang meningkatkan kualitasnya;
- 26) jumlah RA/Madrasah yang mendapat apresiasi/penghargaan;
- 27) jumlah lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah yang diberdayakan;



- 28) jumlah Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) diberdayakan di provinsi;
  - 29) jumlah publikasi kreatif tentang Pendidikan Madrasah;
  - 30) jumlah peraturan yang dihasilkan untuk menjamin layanan pendidikan madrasah yang bermutu;
  - 31) jumlah dokumen kerjasama yang dihasilkan untuk pendidikan madrasah yang bermutu; dan
  - 32) jumlah RA/Madrasah yang melakukan pemberdayaan kesetaraan gender.
- f. Meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah dokumen pengembangan kurikulum RA yang dipersiapkan;
  - 2) jumlah MI yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
  - 3) jumlah MTs yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
  - 4) jumlah MA yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
  - 5) jumlah buku PAI dan Bahasa Arab kurikulum berlaku yang digandakan;
  - 6) jumlah PTK yang dilatih kurikulum yang berlaku; dan
  - 7) jumlah Madrasah yang melaksanakan Pendampingan kurikulum yang berlaku.

**4. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam, dengan sasaran Meningkatnya layanan manajemen pendidikan Islam yang bermutu dengan berbasiskan data dan sistem informasi pendidikan Islam yang ditandai antara lain dengan:**

- a. persentase tersedianya layanan manajemen pendidikan Islam; dan
- b. persentase tersedianya data dan sistem informasi pendidikan Islam sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan monev.

**Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah**

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan program adalah :

1. Prosentase indeks kualitas pembinaan dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75 % pada tahun 2014.
2. Prosentase indeks kualitas pelayanan dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014;
3. Prosentase indeks kualitas pengembangan informasi haji dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014;
4. Prosentase indeks kualitas pembinaan umrah dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014.

Adapun target kinerja adalah :

1. Pembinaan haji dan Umrah :
  - Terlaksananya Publikasi Penyelenggaraan Haji 5 Kegiatan.
  - Terlaksananya Orientasi Bimbingan Manasik Haji 5 Kegiatan.
2. Pengelolaan Dana Haji
  - Layanan Laporan Keuangan Operasional Haji 5 Tahun Anggaran.
3. Dokumen Penertiban Aset Haji .



Kepala Bidang Peny. Haji dan Umrah H. Basir Abdurajak MM bersama Kepala Biro Kesra Provinsi Maluku Utara saat pelepasan Jamaah Haji Provinsi Maluku Utara 2014

### Program Bimas Katolik

Target kinerja Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara adalah :

1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 5 Kegiatan.
2. Pembinaan Rohani Pembina Agama Katolik 5 Kegiatan.
3. Pertemuan Pembinaan Rohani Pembina Sekami 5 Kegiatan.
4. Pertemuan Pembinaan Rohani Pembina Orang Muda Katolik 5 Kegiatan.
5. Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Agama dan Bimas Katolik 10 Lembaga.
6. Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS 80 Orang.
7. Bantuan Pembangunan/Rehab Rumah Ibadah 10 Lokasi.



Kepala bagian Tata Usaha, H. Sarbin Sehe, S.Ag, M.PdI bersama Pembimbing Katolik FX

Belekubun Saat Pembukaan Kegiatan Pembinaan Rohani Pembina Sekami

### Program Bimas Hindu

Target Kinerja Program Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara adalah :

1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu 5 Lembaga
2. Bantuan Operasional Lembaga PHDI 5 Kali

## Program Bimas Buddha

Target Kinerja Bimmas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara adalah :

### Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha

1. Bantuan Tempat Ibadah Agama Buddha 5 Lokasi

### Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha

1. Bantuan Guru Sekolah Minggu Buddha Dhammasekha 70 Orang.
2. Bantuan Guru Pendidikan Agama Non PNS Belum Menerima Tunjangan Profesi 20 Orang.
3. Bantuan Beasiswa Siswa Miskin 150 Orang.

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Target Pendanaan Kantor Wilayah Kementerian Agama 2015-2019

JENIS BELANJA	ANGGARAN PER TAHUN	ANGGARAN DALAM 5 TAHUN	KET
Belanja Pegawai	11.552.476.000	57.762.380.000	-
Belanja Barang	14.272.067.000	71.360.335.000	-
Belanja Modal	6.403.500.000	32.017.500.000	-
Belanja Sosial	410.000.000	2.050.000.000	-

Kerangka Pendanaan berasal dari dana APBN melalui Kementerian Agama maupun yang bersumber dari PNPB maupun SBSN. bantuan Pemerintah daerah terdapat pada program kegiatan yaitu penyelenggaraan haji dan umrah khususnya pada kegiatan

pemberangkatan jamaah haji dan pada beberapa kabupaten/kota terdapat bantuan Operasional Forum Kerukunan Umat Beragama Yang bersumber dari Anggaran Pemerintah.

## **B. KERANGKA PENDANAAN**

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menghasilkan *output* yang telah ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 membutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Sumber pembiayaan perlu dikelola seefisien mungkin akibat tidak seimbangnya kebutuhan pembiayaan dengan sumber biaya yang tersedia. Secara umum, sumber pendanaan yang diperlukan berasal dari anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari partisipasi masyarakat. Skema pendanaan dikelola sedemikian rupa karena terbatasnya sumber pendanaan dibandingkan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang perlu didanai.

Sumber pembiayaan khususnya dari pemerintah pusat yang tidak memadai harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok organisasi. Untuk menambah keterbatasan sumber pembiayaan dari pemerintah, maka diperlukan dukungan dari sumber pendanaan lainnya yang direncanakan melalui skema kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui *Public-Private Partnership (PPP)* dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- b. Mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan keagamaan khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- c. Memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOS;
- d. Meningkatkan *cost-effectiveness* pendanaan secara sistematis.

### **1. Pendanaan Dari Pemerintah**

- 1) Pendanaan Pemerintah Pusat

Alokasi ini merupakan sumber utama dari pendanaan terhadap Kementerian Agama. Pendanaan dari Pemerintah Pusat atau APBN terdiri dari dana rupiah murni yang didistribusikan pemerintah pusat untuk kementerian/lembaga, pinjaman/hibah luar negeri, dan pinjaman dalam negeri. Selain itu, salah satu komponen APBN bersumber dari pengelolaan pendapatan suatu unit organisasi dan dimanfaatkan kembali oleh unit organisasi tersebut melalui mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Total alokasi pendanaan seluruh program rata-rata per tahun adalah Rp. 477.000.000.000 yang ditetapkan dalam RPJMN dalam rangka mencapai target kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yang dibagi ke dalam 9 Program termasuk alokasi untuk gaji pegawai dan belanja operasional seperti listrik, telepon dan air.

Rancangan alokasi anggaran terbesar adalah untuk pendidikan agama dan pendidikan keagamaan selaras dengan kewajiban pemenuhan 20% anggaran pendidikan nasional, yaitu rata-rata 85% dari total alokasi yang direncanakan untuk Kementerian Agama. Alokasi tersebut selain akan digunakan untuk mendanai program nasional yang berkelanjutan seperti BOS, tunjangan profesi guru, penyediaan sarana pendidikan dan juga untuk mendanai program baru sehubungan dengan NAWA CITA antara lain penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP).

## 2) Pendanaan Pemerintah Daerah

Meskipun Kementerian Agama dan seluruh satuan kerjanya termasuk madrasah dan sekolah keagamaan lainnya merupakan bagian dari binaan pemerintah pusat namun kontribusi dari pemerintah daerah sangat diharapkan untuk turut serta mendanai pendanaan baik dalam pelaksanaan ibadah haji, pemberian bantuan Forum Kerukunan Umat Beragama maupun pembangunan bidang Agama dan Pendidikan. Beberapa pemerintah daerah telah berkontribusi dalam membantu pendanaan tersebut di atas serta dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Besarnya pengalokasian ini sangat tergantung pada kemampuan keuangan dan komitmen pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menyokong pelayanan dalam kehidupan beragama serta penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di wilayahnya, maka diperlukan peran aktif dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, madrasah serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya dalam mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Beberapa kerjasama dan kontribusi yang telah dilaksanakan antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah antara lain:

- 1) Bantuan pemberangktan ibadah haji ke embarkasi Makassar
- 2) Bantuan Operasional FKUB;
- 3) Pemberian alokasi Biaya Operasional Pendidikan Pemerintah Daerah yang tidak hanya dialokasikan bagi sekolah reguler tapi juga dialokasikan bagi madrasah.
- 4) Pemberian tambahan tunjangan bagi guru madrasah, guru agama, dan penjaga sekolah/Madrasah.
- 5) Pemberian bantuan atau hibah bagi sarana prasarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
- 6) Sinergi penyelenggaraan kegiatan keagamaan serta kegiatan pendidikan bagi satuan pendidikan umum dengan satuan pendidikan agama dan keagamaan.

## **2. Pendanaan Masyarakat**

Alokasi pendanaan yang berasal dari masyarakat, berasal dari perseorangan, kelompok organisasi masyarakat maupun perusahaan. Kontribusi masyarakat khususnya bagi peningkatan kehidupan keagamaan, melalui antuan bagi sarana ibadah dn penyelenggaraan Kegiat keagamaan serta bagi kegiatan pendidikan Islam dan pendidikan keagamaan Islam sudah berlangsung sejak lama. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pendirian Ruang Kelas Madrasah yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, pendirian lembaga sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan Islam yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara merencanakan untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat agar dapat terus berperan aktif dalam penyediaan pendanaan kegiatan keagamaan secara mandiri dengan tetap memberikan stimulus secara proporsional.

Hal lain yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kerangka pendanaan pembangunan bidang pendidikan Islam adalah meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui *Public-Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), memberikan insentif bagi industri yang melakukan kerja sama dengan satuan pendidikan.